



Analisis Efektivitas Program Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Spp) Mandiri Perdesaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Upk Syariah Tujuh Sarumpun Kec Ampek Angkek Kab Agam)

Divine Nashiro¹, Yusmar Yusuf²

1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Received: 27 November 2025
Revised: 12 Desember 2025
Accepted: 24 Desember 2025

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan program SPP yang ada pada kantor UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara dan jenis penelitian lapangan kepada informan penelitian sebanyak dua yaitu sekretaris kantor UPK syariah tujuh sarumpun dan salah satu ketua kelompok program SPP.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis Efektivitas Program Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada UPK Syariah Tujuh sarumpun terdiri dari pencapaian dari program tersebut yaitu memiliki 3 variable kurun waktu, sasaran dan dasar hukum, tingkat kualitas dan kuantitas yang baik, modal yang di tentukan sudah sesuai yang di inginkan dan hasil dari program yaitu peningkatan pendapatan anggota kelompok. Mekanisme pinjaman dana SPP pada UPK Syariah Tujuh Sarumpun yaitu tahap pembinaan kelompok, tahap pengajaran tahap penyeleksian, tahap pencairan dana dan tahap pengembalian pinjaman.

Kata Kunci: Efektivitas, Meningkatkan Pendapatan

(*) Corresponding Author:

dini66787@gmail.com, yentyastariwedewi@gmail.com

How to Cite: Nashiro, D., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Efektivitas Program Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Spp) Mandiri Perdesaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Upk Syariah Tujuh Sarumpun Kec Ampek Angkek Kab Agam). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 300-310. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13549>.

PENDAHULUAN

Kesenjangan yang ada di desa yang ada pada Batas antara kota dan desa yang terletak dekat dengan kota menjadi parameter bagi pemerintah, dan kesenjangan yang dimaksudkan merujuk pada kurangnya peluang pekerjaan bagi penduduk di desa. Akibatnya, masyarakat hanya memiliki sedikit opsi pekerjaan, terutama di sektor pertanian. Selain itu, akses jalan yang buruk dari desa ke pusat kota menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Masalah lainnya adalah minimnya layanan kesehatan di daerah tersebut.¹ Selain itu, terdapat permasalahan lain, yaitu kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai konsep yang memiliki dimensi ganda, mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Dari segi ekonomi, kemiskinan mengindikasikan kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan mencakup berbagai jenis kekayaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.² Permasalahan

¹ Andi agustang Andi Ashar, "Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo," *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 2 (2020): 20.

² Abu Huraerah, "Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no. 1 (2013): 3-4.

kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah pedesaan, yang dikenal sebagai Program Pro Rakyat. Program ini mencerminkan ciri khas pemerintahan Presiden SBY, dan masyarakat sangat berharap agar program ini terus berlanjut guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu inisiatif dalam Program Pro Rakyat yang diperkenalkan oleh beliau adalah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP).

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di masyarakat, pemerintah telah meluncurkan PNPM MP sejak tahun 2007. Program ini melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pendekatan pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi kurang mampu, diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sehingga mereka bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu aspek dari pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan.³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 12. Pasal tersebut berbunyi: “Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

Program PNPM MP menawarkan beberapa inisiatif pemerintah, salah satunya adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang memberikan dana bergulir kepada kaum perempuan. Prinsip dasar PNPM-MP SPP adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat, khususnya perempuan, dengan tujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha produktif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan peluang pekerjaan di pedesaan, mendorong kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Pada dasarnya tujuan dana PNPM Mandiri sangat mulia, dengan memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan modal untuk memulai, mengembangkan usaha agar mampu meringankan penderitaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan masyarakat juga harus dibantu guna menghindari terjadinya keterpurukan, kelangsungan hidup mereka dan kelangsungan beragama dan bernegara. Dengan demikian, adanya program PNPM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga PNPM dianggap mampu memberikan masalah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Ampek Angkek.

PNPM Mandiri Perdesaan terbagi dalam tiga kegiatan utama yaitu:

³ Ananda Rizkina, Zaki Fuad, and Isnaliana Isnaliana, “Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Upk Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar),” *JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 2, no. 2 (2020): 157–58.

1. Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan bahwa prasarana yang dibangun,
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat dan bantuan manajemen usaha, dan
3. Perluasan kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin yang meliputi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dikelola oleh suatu lembaga bernama Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga pengelola kredit mikro di tingkat kecamatan mempunyai potensi yang besar untuk dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin. Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh UPK adalah kinerja UPK tersebut. Untuk melihat pencapaian pelaksanaan kegiatan UPK diperlukan kajian-kajian sehingga dapat memberi gambaran mengenai penilaian efektifitas suatu kelompok dalam mengelola sesuatu yang telah berhasil dicapai. Efektifitas merupakan pengukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.⁴

Maka dari itu adanya dana BLM PNPM yang di kelola oleh UPK untuk membantu perekonomian di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat yang memiliki 33 jorong. Dengan jumlah penduduk sebanyak 44.949 jiwa. Sebanyak 1.647 KK di kategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM). Mata pencarian utama masyarakat di sini adalah petani. Kecamatan ini adalah beras, ubi jalar, ubi singkok, dan jagung. Kecamatan ini berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan 2008. Hingga saat ini Kecamatan Ampek Angkek telah mendapatkan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) yang di kelola UPK.

TABEL 1.1
Data BLM Yang di Kelola UPK

Tahun	Jumlah(RP)
2008	3.000.000.000
2009	900.000.000
2010	1.500.000.000
2011	450.000.000
2012	800.000.000
2013	850.000.000
2014	754.715.000
TOTAL	8.254.715.000

Sumber: UPK Syariah Ampek Angkek

Secara umum, dana BLM PNPM Mandiri perdesaan di manfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang peningkatan kapasitas, pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi melalui perguliran dana. Melalui skema Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Berikut akumulatif dana BLM yang dialokasikan untuk dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang di kelola oleh UPK:

TABEL 1.2

⁴ Ananda Rizkina, Zaki Fuad, and Isnaliana Isnaliana, "Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Upk Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)," *JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 2, no. 2 (2020): 156.

Data Dana SPP dari BLM yang di Kelola UPK

Tahun	Jumlah(RP)
2008	223.500.000
2009	130.000.000
2010	356.000.000
2011	105.000.000
2012	185.000.000
2013	172.000.000
2014	110.055.000
TOTAL	1.281.575.900

Sumber : UPK Syariah Ampek Angkek

Secara akumulatif dari awal mendapatkan BLM hingga saat ini, sebagian besar dana BLM di kecamatan Ampek Angkek ini sekitar peningkatan kapasitas masyarakat 3,94%, pendidikan (beasiswa) 8,45%, sarana prasarana 68,71%, dan simpan pinjam perempuan 14,09%, OP UPK 1,91%, OP TPK 2,89%. Pemanfaatan dana BLM yang dominan di gunakan untuk Irigasi, dan pembukaan dan peningkatan jalan.

Dari uraian pendahuluan di atas, program yang di jalankan Unit Pengelolaan Kegiatan Syariah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam mengatasi kemiskinan. Sehingga perlu adanya penelitian dan pengujian untuk melihat Peran UPK Syariah dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kecamatan Ampek Angkek, maka peneliti mengangkat judul “ **Analisis Efektivitas Program Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Mandiri Perdesaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus UPK Syariah Tujuh Sarumpun KEC Ampek Angkek KAB Agam)**”

KAJIAN PUSTAKA

Ari Pratama melakukan penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh (Studi kasus UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam). Yang mana hasil penelitiannya Terkait dengan perubahan jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta program SPP PNPM UPK Mandiri Perdesaan, perhitungan ini dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta yang tergolong miskin. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha dalam bentuk simpan pinjam dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di kecamatan Baitussalam.

Elva Dewi melakukan penelitian yaitu tentang Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan WAY KRUI Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan Kefektifitasan suatu program PNPM MP dan SPP ini di karenakan mampu membantu Masyarakat miskin untuk melanjutkan kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik, yang dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun pendidikan anak. Adanya bantuan modal usaha yang diberikan, secara langsung dapat membantu Perempuan anggota simpan pinjam untuk membantu perekonomiankeluarga melalui usaha kecil yang dijalankan, sehingga usaha tersebut tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Pahruroji melakukan penelitian yaitu tentang Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam dianalisis dari sudut pandang Ekonomi Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak suatu pinjaman terhadap peningkatan pendapatan anggota peminjam yang

mendapatkan modal dari PNPM Mandiri Perdesaan efektif karena dapat meningkatkan pendapatan pedangang di desa Sinar Saudara terbukti bahwa peminjam yang menggunakan pinjaman tersebut lebih bersifat produktif yang akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan.

LANDASAN TEORI

Istilah efektivitas ialah kata yang tidak asing yang sering muncul dalam kajian ilmu Administrasi Negara. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁵

Tujuan akhir dari suatu kegiatan atau program adalah mencapai efektivitas, di mana hasil yang terjadi sesuai dengan rencana dan harapan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan ketercapaian realita yang sesuai dengan perencanaan awal dan harapan yang diinginkan.

A. Indikator Pengukuran Efektivitas

Menurut pendapat Chairunnisa, mengemukakan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan. Terwujudnya tujuan adalah suatu proses yang dilihat sebagai upaya. Oleh karena itu, untuk memastikan pencapaian tujuan akhir yang terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam hal pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam hal periodisasi. Pencapaian tujuan terdiri dari tiga sub-variabel, yaitu rentang waktu, target konkret, dan dasar hukum.
2. Integrasi. Integrasi berhubungan dengan kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dengan pihak lain.
3. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya

Sedangkan menurut Safuridar Indikator Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan 4 Indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas.

Dilihat dari pendapat masyarakat, oleh karena itu terdapat 5 unsur didalamnya yakni: kemudahan dalam proses pengajuan proposal, dana pinjaman bergulir mampu membantu masyarakat kurang mampu, pengembaliannya tidak dikenakan denda, dapat dilakukan kapan saja, dan dapat diajukan oleh semua kelompok perempuan.

2. Tingkat Kuantitas

Melihat secara fisik dari segi hasil, seperti apakah dana pinjaman bergulir sudah sesuai dengan tujuannya, sosialisasi program dilakukan dengan baik oleh pengelola, jangka waktu pengembalian tidak lebih dari 12 bulan, persyaratan pinjaman tidak dipersulit, dan jumlah pinjaman penghasilan.

3. Modal.

Mempengaruhi jumlah Melihat penyalurannya modal yang dipinjamkan sesuai dengan jenis usaha, modal yang dipinjamkan digunakan untuk mengembangkan usaha, jumlah pinjaman sesuai dengan yang diajukan didalam proposal kelompok, modal yang didapat bisa digunakan untuk keperluan lainnya jasa yang dibebankan lebih ringan.

4. Hasil/Output.

⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di DSA Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan," *Ilmu Sosial Dan Hukum* 1 (2012): 3.

Melihat pendapatan anggota mengalami peningkatan, menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan individu dan kelompok, meningkatkan barang-barang yang dipakai untuk berusaha, mengurangi angka kemiskinan.⁶

Pinjaman bergulir merupakan kegiatan yang memberikan keringanan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pinjaman berupa simpan pinjam perempuan. Pinjaman bergulir ini merupakan salah satu Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk pinjaman BKAN UPK yang masyarakat gunakan untuk penyediaan dana melalui kelompok masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir ini adalah untuk memperluas kegiatan modal komersial kepada masyarakat, serta menambah modal bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan modal komersialnya. Kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perdesaan menargetkan kelompok simpan pinjam perempuan dan keluarga miskin. Pengelolaan kegiatan ini telah mengarah pada pengembangan pinjaman bergulir, yang mengatur tentang pelestarian kegiatan pinjaman bergulir dan meringankan kesulitan pembiayaan modal.⁷

Kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan adalah kegiatan dari kelompok perempuan dimasyarakat pedesaan dalam mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga diantara anggota-anggotanya. Secara umum program (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan ini bertujuan untuk memajukan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan jalan masuk untuk dana usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun tujuan khusus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri adalah :

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan permodalan.
3. Mendorong penguatan program simpan pinjam oleh kaum perempuan.⁸

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini memakai metode penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dimana dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai fenomena seberapa besar sebuah efektivitas dari Pinjaman terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). dalam penelitian ini, penulis menyajikan berupa data yang akan diteliti dengan teknik kualitatif deskriptif tersebut.

Kata-kata ditulis atau lisan dari orang yang diwawancarai secara langsung. data dibagi menjadi dua yaitu data primer (hasil wawancara dan observasi langsung) dan sekunder (dokumen dari objek penelitian). adapun tahap dari penelitian ini yaitu dari observasi dan wawancara serta dokumentasi . lokasi dan waktu yang digunakan di UPK Syariah Tujuh

⁶ Putu Karismawan, Aulia Asry, M. Firmansyah, "Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa COVID-19 (Studi Pada Rumah Tangga Peserta Program Kotaku Di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur)" 7, no. 2 (2022): 250.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁸ Sinollah, "Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)," *Jurnal Dialektika* 4, no. 2 (2019): 34.

Sarumpun Ampek Angkek, waktunya kurang lebih satu bulai mulai dari bulan desember sampai Januari.

HASIL PENELITIAN

Konsep lembaga keuangan di UPK ini melibatkan penolakan terhadap dana dari masyarakat, karena program ini bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah. UPK bertanggung jawab atas penyaluran dan pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Praktik membayar lebih dianggap baik dalam Islam sebagai ungkapan terima kasih dari peminjam atau pengutang. Meskipun demikian, kesepakatan hutang piutang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memaksa mereka yang membutuhkan uang. Sebenarnya, transaksi hutang piutang seharusnya bersifat taawun (tolong-menolong), namun terkadang kesepakatan ini diubah menjadi bentuk tambahan pembayaran yang disebut riba. Tindakan ini dapat ditemui di berbagai lapisan masyarakat, baik dalam kelompok maupun perorangan.

Mekanisme adalah tahapan-tahapan Mekanisme merujuk kepada langkah-langkah yang diterapkan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elfi, yang menjabat sebagai sekretaris UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek. Proses penyaluran pinjaman untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Syariah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

A. Tahap pembinaan kelompok

Dengan adanya pembinaan kelompok tentunya sebelum itu kita harus membentuk kelompok SPP yang berjumlah 10-25 orang, untuk masuk ke dalam kelompok Ibuk elfi mengatakan : “untuk masuk di dalam kelompok tidak adanya ketentuan khusus di karenakan UPK ini tujuannya untuk membantu ibuk-ibuk yang ingin membuka usaha dengan memberikan modal atau pinjaman bagi yang membutuhkan.” Di dalam sebuah kelompok tentu adanya ketua untuk membina kelompok dan segala urusan yang ada di dalam kelompok di pertanggungjawabkan oleh ketua kelompok.

B. Tahap Pengajuan Pinjaman

Setelah melalui tahap pembinaan kelompok, ketua kelompok mengunjungi kantor UPK untuk mengambil berkas pengajuan proposal. Selanjutnya, ketua kelompok membuat proposal sebagai salah satu persyaratan, yang mencakup identitas setiap anggota, jenis usaha yang dijalankan, dan jumlah pinjaman yang diajukan. Selain itu, mereka juga harus melengkapi syarat-syarat lainnya. Beberapa persyaratan proposal pengajuan dana pinjaman mencakup:

1. Surat pengantar.
2. Surat pengajuan kredit.
3. Data profil kelompok.
4. Daftar pengurus dan anggota kelompok calon peminjam.
5. Rencana angsuran kelompok.
6. Aturan-aturan kelompok.
7. Surat pernyataan kesanggupan kelompok dan anggota untuk tanggung rentang.
8. Foto copy kartu penduduk masing-masing calon peminjam.
9. Foto copy kartu keluarga masing-masing calon peminjam.
10. Rencana anggaran biaya kelompok.

C. Tahap Penyeleksian

Setelah mengisi semua persyaratan yang diperlukan, dokumen-dokumen diserahkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk diperiksa atau dikelola. UPK kemudian menugaskan sebuah tim verifikasi untuk melakukan pengecekan. Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota kelompok akan melalui proses verifikasi oleh tim tersebut. Tim

verifikasi adalah sebuah kelompok sementara yang dibentuk oleh UPK untuk membantu dalam perencanaan kegiatan dan menilai usulan kegiatan. Anggota tim ini dipilih berdasarkan kemampuan atau keahlian mereka dalam berbagai bidang seperti lembaga keuangan mikro, koperasi, kewirausahaan, dan lainnya, sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan.

Verifikasi akan dilaksanakan dalam rentang waktu 5 hingga 7 hari setelah proposal diajukan ke UPK. Tim verifikasi bertanggung jawab untuk memeriksa keakuratan dan kesesuaian data kelompok dengan kebutuhan mereka. Setelah melakukan survei dan memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh kelompok tersebut benar, dana pinjaman akan segera disalurkan dalam dua hingga tiga minggu setelah proses verifikasi. Tim verifikasi juga akan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan setiap permohonan pinjaman, dengan opsi "layak" berarti tim pendanaan dapat langsung mencairkan dana. pinjaman dana tersebut, dan jika "tidak layak" dapat diperbaiki usulannya pada periode tahun berikutnya.

D. Tahap Pencairan Pinjaman

Tim verifikasi mengajukan hasil rekomendasi pendanaan kepada tim pendanaan. Selanjutnya, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyusun dokumen penyaluran pembiayaan untuk kelompok dan mempersiapkan pembiayaan. Setelah itu, tim pendanaan mengadakan rapat untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen dan menyetujui usulan dari kelompok perempuan. Tugas utama mereka adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam penyaluran pinjaman. Setelah proposal diverifikasi dan ditandatangani oleh tim pendanaan, jadwal penyaluran biasanya dilakukan dalam satu bulan, mencakup 4 hingga 6 kelompok sesuai urutan proposal yang diterima. Sementara sisanya akan dimasukkan dalam daftar tunggu untuk bulan berikutnya.

Kemudian, UPK melaksanakan penarikan dana sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah diverifikasi untuk setiap kelompok dan anggota. Pencairan pinjaman ini terjadi pada awal dan akhir bulan, seiring dengan penyaluran rutin ke kelompok setiap bulannya. UPK selanjutnya melakukan transaksi muwakalah dengan pihak ke-3 atau pengurus kelompok dalam waktu 1 minggu setelah pencairan, dengan tujuan membantu pembelian barang sesuai kebutuhan anggota. Pihak ke-3 atau pengurus kelompok bertanggung jawab atas pembelian barang, yang kemudian diverifikasi dan diperiksa ulang oleh UPK. Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan barang dan mendapatkan bukti pembelian yang dilakukan oleh pihak ke-3. Setelah verifikasi oleh UPK, akad multijasa baru terjadi antara UPK, kelompok, dan anggota kelompok SPP.

E. Tahap Pengembalian Pinjaman

Pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan, dengan pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan. Setiap anggota SPP bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman dengan menyerahkan pembayaran angsurannya kepada ketua kelompok, yang nantinya akan disetorkan kepada UPK. Alternatifnya, anggota juga dapat langsung menyertorkan angsurannya ke kantor UPK syari'ah Tujuh Sarumpun Ampek Angkek.

Semua pinjaman yang diperoleh dari dana SPP harus dikembalikan bersama dengan keuntungan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam proposal kelompok. Pihak UPK menetapkan margin keuntungan sebesar 1% per bulan dari jumlah pokok pembiayaan. Bagi anggota yang tidak mampu melunasi pinjamannya dalam satu tahun, tidak akan dikenakan denda. Namun, UPK dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman melalui penandatanganan surat perjanjian baru. Dalam surat perjanjian tersebut, peminjam menyatakan kesanggupannya untuk melunasi sisa pinjaman dalam beberapa tahun ke depan, dengan pembayaran bulanan yang disesuaikan dengan kemampuannya. UPK tidak mengenakan paksaan, karena pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Bahkan jika surat perjanjian sebelumnya

tidak dapat dipenuhi setelah setahun, dapat dibuat surat perjanjian baru hingga peminjam mampu membayar utangnya. Meskipun memakan waktu, yang terpenting adalah dapat melunasi tunggakan tersebut. terselesaikan yang penting peminjam ada niat untuk membayar.

Namun, apabila peminjam tidak menunjukkan niat untuk melunasi pinjaman setelah mendapatkan beberapa peringatan dari pihak UPK, konsekuensinya akan dirasakan oleh seluruh gampong. Gampong tersebut akan kehilangan hak untuk mengajukan pinjaman baru, sehingga semua penduduk di dalamnya turut merasakan dampaknya. Sanksi ini hanya akan dicabut jika tunggakan pembayaran dapat diselesaikan. Oleh karena itu, sebagian anggota masyarakat saling bahu-membahu untuk membantu melunasi pinjaman yang diambil oleh sesama anggota kelompok, dengan tujuan agar tidak ada efek negatif yang menimpa masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan akhir dari suatu kegiatan adalah efektivitas, di mana kenyataannya sesuai dengan perencanaan dan harapan. Sebelum mengevaluasi efektivitas program ini, perlu melihat perencanaan dan harapan UPK Syariah dalam mencapai tujuannya. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Elfi, "Program SPP ini dirancang untuk membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman atau bantuan, serta menghindari rentenir yang memberlakukan bunga tinggi. UPK ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan."

Berdasarkan wawancara dari ibu elfi " program spp ini sudah efektif atau tujuannya sudah tercapai yaitu membantu Masyarakat dari segi keuangan bisa dari memberi modal atau lainnya. Di dalam upk ini memiliki 47 yang berisikan kelompok ibu-ibu yang sudah memiliki usaha sendiri seperti konversi yang ada di pasar aur bukittinggi yang sudah berkembang sampai sekarang"

Berdasarkan wawancara dari ibu devi ketua dari kelompok santunan ibu, ibu devi mengatakan "program SPP ini sangat membantu dikarenakan ibu devi ini adalah salah satu yang memiliki konversi yang ada di aur bukittinggi, yang sudah memiliki karyawan untuk membantu ibu devi.

Keberhasilan program SPP ini bisa di lihat dari ibu devi sebagai anggota kelompok simpan pinjam Perempuan. Sebelum mengenal program SPP ibu ini adalah seseorang ibu rumah tangga, sekarang sudah memiliki usaha sendiri, pendapatan sendiri dan dapat membuka lapangan baru bagi yang masih menganggur.

Dalam mengukur efektivitas dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maka diperlukan beberapa indikator untuk mengukur tingkat efektivitasnya, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Untuk melihat pencapaian tujuan lihat dari 3 variable yaitu kurun waktu, sasaran atau target dan dasar hukum. Di dalam sebuah pencapaian tentu adanya kurun waktu untuk simpan pinjam dari sebuah UPK ini di karenakan, program ini pinjaman bergulir, yang mana apabila pinjaman itu sudah dikembalikan dan berkumpulnya modal. Modal tersebut di gulirkan kembali.

Tentunya adanya target dari sebuah program SPP ini, untuk sekarang adanya 47 kelompok yang aktif di program tersebut. Itu adalah salah satu pencapaian suatu target. Di dalam sebuah program adanya ketentuan atau dasar hukum yang harus di patuhi oleh sebuah kelompok. Bisa di lihat SOP dari program SPP ini.

2. Integrasi

UPK Tujuh Sarumpun Ampek Angkek ini memiliki pertemuan dengan UPK yang lainnya, seperti membuat pertemuan sosialisasi tentang program SPP ini atau untuk menjalin tali silaturahmi yang baik di karenakan setiap program ini kan adanya kerja sama dengan UPK yang lainnya.

3. Tingkat Kualitas dan kuantitas

Di dalam tingkat ini tentunya UPK Tujuh Sarumpun ini memiliki kualitas yang baik, contohnya memberi kemudahan dalam proses pengajuan proposal, dana yang di berikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, semua kelompok perempuan dapat mengajukan pinjaman tanpa terkecuali. Jangka waktu pengembalian ini tidak kurang dari 12 bulan. Dan pinjaman akan cair sesuai yang di inginkan kelompok.

4. Modal

Modal yang di berikan UPK tentunya sesuai dengan yang di minta oleh kelompok. Di karenakan setiap kelompok itu memiliki tujuan untuk meminjam dari program ini, contohnya seperti membuka usaha, membeli kebutuhan sekolah anak dan lain sebagainya.

5. Hasil

Hasil ini bisa kita lihat dari peningkatan pendapatan anggota kelompok, yang sebelum tau program ini sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan, sekarang semenjak tau Program ini ibu-ibu rumah tangga sudah menjadi mengusaha dan banyak membuka lapangan pekerjaan baru.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dalam penelitian efektivitas program dana simpan pinjam khusus Perempuan (SPP) mandiri perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan, Dari mekanisme pinjaman program SPP di UPK Tujuan Sarumpun Ampek Angkek adalah: tahap pembinaan kelompok, tahap pengajuan pinjaman, tahap penyeleksian, tahap pencairan pinjaman, tahap pengembalian pinjaman. Akad yang di gunakan UPK Tujuan Sarumpun ini adalah akad multijasa yaitu pihak UPK mengambil keuntungan sebesar 1%

Pembiayaan SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan kaum perempuan, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam hal peningkatan pendapatan dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, tingkat kualitas, tingkat kuantitas, modal dan hasil dari program SPP ini.

SARAN

Sebaiknya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dan lebih dimajukan program SPP ini agar kaum Wanita lebih mengenal dengan program ini. Dan di tingkatkan operasioanalnya lebih ke digital seperti adanya aplikasi UPK ini untuk simpan pinjam agar dapat mempermudah dan mengikuti zaman globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ashar, Andi agustang. "Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo." *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 2 (2020): 20. http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php.
- Aulia Asry, M. Firmansyah, Putu Karismawan. "Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa COVID-19 (Studi Pada Rumah Tangga Peserta Program Kotaku Di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur)" 7, no. 2 (2022): 250.
- Huraerah, Abu. "Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no. 1 (2013): 3-4.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rizkina, Ananda, Zaki Fuad, and Isnaliana Isnaliana. "Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Upk Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *JIHBIZ:Global Journal of*

Islamic Banking and Finance. 2, no. 2 (2020): 157–58.
<https://doi.org/10.22373/jihbiz.v2i2.8646>.

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di DSA Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.” *Ilmu Sosial Dan Hukum* 1 (2012): 3.

Sinollah. “Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri).” *Jurnal Dialektika* 4, no. 2 (2019): 34.
<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/347>.